



# ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAS WAE BATU MERAH KOTA AMBON

*(Stakeholder Analysis of Water Resources Management of Wae Batu Merah Watershed in Ambon City)*

Rizky Haulussy<sup>1</sup>, Bokiraiya Latuamury<sup>2</sup>, & Iskar<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

<sup>2</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233, Indonesia

## Informasi Artikel:

Submission : 21 September 2023  
Accepted : 16 April 2024  
Publish : 19 April 2024

## \*Penulis Korespondensi:

Iskar  
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian,  
Universitas Pattimura, Ambon, 97233  
Indonesia  
e-mail: [iskar72@yahoo.co.id](mailto:iskar72@yahoo.co.id)  
Telp: +62 813-4300-0841

Makila 18 (1) 2024: 52-67

DOI:  
<https://doi.org/10.30598/makila.v18i1.10561>

## ABSTRACT

*This study aims to identify the main roles and tasks of relevant stakeholders in managing water resources and analyze the stakeholders influence and interests in managing water resources of the Wae Batu Merah Watershed of Ambon City. The research method uses a descriptive with a qualitative approach. The sampling method was purposive sampling, which in this research was 13 agencies/institutions/Apparatus Organizations (OA). The research identified relevant stakeholders main roles and tasks in the management of water resources of the Wae Batu Merah Watershed in Ambon City including 13 Regional OA/ agencies/ government/institutions. The results of mapping the influence and interests of stakeholders related to water resources management in the Batu Merah watershed show that there are four stakeholders in quadrant I (subjects), namely the Soya State Government, Batu Merah State Government, PT Dream Sukses Arindo and PDAM Kota Ambon. Quadrant II (Player) are the River Basin Center of Maluku Province, the Maluku Provincial Forestry Service. The Maluku Provincial Watershed Management Center, and the Disaster Management Agency of Ambon City. Quadrant III (Crowd) are the Maluku Provincial Watershed Forum, and the Regional Technical Implementation Unit Forest Management Unit of Ambon City. Finally, quadrant IV (context setters), are the Research and Development Agency of Ambon City, the Regional Development Planning Agency of Maluku Province, and the Environment Office of Maluku Province.*

**KEYWORDS:** Stakeholders, Watershed Wae Batu Merah, Water resources

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tugas pokok para pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan dalam pengelolaan sumberdaya air dan menganalisis pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah Kota

---

Ambon. Pengambilan sampel secara purposive sampling yang dalam penelitian ini adalah 13 instansi/Lembaga/rganisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi peran dan tugas pokok para pemangku kepentingan yang relevan dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon meliputi 13 OPD/instansi/ lembaga pemerintah. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak terkait pengelolaan sumberdaya air menunjukkan bahwa terdapat empat stakeholder yang berada pada kuadran I (subjek) yaitu pemerintah Negeri Soya, pemerintah Negeri Batu Merah, PT Dream Sukses Arindo dan PDAM Kota Ambon. Kuadran II (player) yaitu Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Maluku, dan Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon. Kuadran III (Crowd) yaitu Forum DAS Provinsi Maluku, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Kota Ambon dan kuadran IV (context setters) yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

KATA KUNCI: DAS Wae Batu Merah, pemangku kepentingan, sumberdaya air.

---

## PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu megasistem yang kompleks, meliputi sistem fisik (*physical systems*), sistem biologis (*biological systems*), dan sistem manusia (*human system*). Setiap sistem dan sub-sub sistem didalamnya saling berinteraksi, peranan tiap-tiap komponen dan hubungan antar komponen sangat menentukan kualitas ekosistem DAS (Latuamury, 2020). Gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem akan dirasakan oleh komponen lainnya dengan sifat dampak berantai. Keseimbangan ekosistem akan terjamin apabila kondisi timbal balik antar komponen berjalan dengan baik dan optimal (Ekawati et al., 2012; Nurtjahjawilasa et al., 2015).

Stakeholder adalah individu atau kelompok dengan kepentingan substantif dalam suatu persoalan, termasuk mereka yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan atau melakukannya (Barney & Harrison, 2020). Definisi lainnya *stakeholder* adalah semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, baik yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan baik secara langsung maupun tak langsung, dan negatif maupun positif. Selain itu, *stakeholder* juga berasal dari kelompok yang relevan memiliki atau memegang kendali beserta semua instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan (Setiawan & Nurcahyanto, 2018).

Menurut (Hidayat et al., 2020) *stakeholder* yaitu sebagai masyarakat, baik individual maupun kelompok, yang memiliki legitimasi, kekuasaan, dan kepentingan terhadap keberhasilan

pengelolaan sumberdaya air. Para stakeholder memiliki peran dan pengaruh yang besar pada keberlangsungan pengelolaan sumberdaya air (Latuamury, et al., 2021). (Di Baldassarre et al., 2019), menyatakan bahwa *stakeholders* dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu *stakeholder* utama (*primary stakeholders*) dan *stakeholder* lainnya atau pendukung (*secondary stakeholders*). *Stakeholder* utama yang terkait dan mempengaruhi keberlangsungan pengelolaan sumberdaya air diantaranya yaitu Lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumberdaya air secara langsung seperti Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, sektor swasta yang relevan dengan sumberdaya air seperti perusahaan air minum dan mitra lainnya. Sedangkan *stakeholder* lainnya atau pendukung terdiri dari komunitas, kelompok aktivis lingkungan atau sosial, dan juga pemerintah maupun pembuat kebijakan lainnya (Luthfi, 2019).

Klasifikasi pemangku kepentingan mengintegrasikan pemangku kepentingan ke dalam manajemen strategis, dengan sebuah peta pemangku kepentingan dalam organisasi pengelolaan sumberdaya air yang sangat penting dalam penjaminan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya air dari generasi ke generasi. Pengelolaan sumberdaya air memerlukan pemangku kepentingan yang paling penting untuk mengumpulkan umpan balik dari hubungan pemangku kepentingan dan meningkatkan proses mereka (Freeman et al., 2021). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, walaupun digolongkan sebagai *stakeholder* lainnya atau pendukung, banyak aspek yang menjadi penentu pentingnya peran *stakeholder* tersebut terhadap pengelolaan sumberdaya air (Kujala et al., 2022). Sebagai contoh, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dianggap sebagai *stakeholder* yang penting. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan sangat menentukan strategi pengelolaan sumberdaya air. Adanya komunitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air juga perlu dipertimbangkan sebagai *stakeholder* yang penting dikarenakan komunitas masyarakat dapat mempengaruhi fleksibilitas dari keberlanjutan pengelolaan sumberdaya air, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pemangku kepentingan berperan penting terjadinya perubahan kondisi lingkungan salah satunya dapat dianalisa melalui peranan berbagai pihak yang berkepentingan, dimana turut berpengaruh terhadap perubahan karakteristik fisik DAS. Keberadaan dan peran berbagai pemangku kepentingan di suatu DAS menjadi penting dalam mengembalikan fungsi ekosistem DAS dan mempertahankan kondisi DAS supaya tidak lebih terdegradasi (Ramoglou et al., 2023). Pentingnya peran stakeholder terhadap pengelolaan sumberdaya air, maka diperlukan analisis stakeholder. *Stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya (Ast & Rosa, n.d.). Adapun klasifikasi stakeholder adalah sebagai berikut (Ozdemir et al., 2023): a) *Stakeholder primer* merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan sesuatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat. b) *Stakeholder*

*sekunder* adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah yaitu lembaga (aparatur), lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan pengusaha. c) *Stakeholder kunci* merupakan elemen eksekutif berdasarkan level yang memiliki otoritas hukum untuk mengambil keputusan, legislatif dan instansi yaitu pemerintah daerah, DPR kabupaten, dan Dinas yang membawahi langsung program/proyek yang bersangkutan. Selanjutnya, analisis *stakeholder* menjadi menjadi cara untuk mencari informasi terkait dengan *stakeholder* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap keputusan atau kebijakan (Bridoux & Stoelhorst, 2022). Seorang *decision making* harus mampu memetakan siapa saja *Stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan, baik dalam formulasi kebijakan sampai implemmentasi kebijakan dan termasuk dalam memetakan target grup dari kebijakan itu sendiri (Kujala et al., 2022).

DAS Wae Batu Merah Negeri Batu Merah memiliki luas 359,73 Ha, dengan variasi penggunaan lahan meliputi Hutan lahan kering primer seluas 36,61 Ha, hutan lahan kering sekunder seluas 270,32 Ha, Pertanian lahan Kering campuran seluas 43,43 Ha, dan permukiman seluas 9,37 Ha. DAS Wae Batu Merah secara administratif mengalir di Negeri Batu Merah Kota Ambon. DAS Wae Batu Merah di Negeri Batu Merah secara geografis terletak berbatasan di sebelah utara dengan Bukit/ Gunung dan sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, dan di sebelah barat berbatasan dengan sungai. Selain itu batas Negeri Batu Merah secara administratif berbatasan dengan Negeri Ema di sebelah Utara, berbatasan dengan laut Banda di sebelah Timur dan berbatasan Laut di sebelah Selatan dan Negeri Kilang di Sebelah Barat. Aksesibilitas DAS Wae Batu Merah memiliki jarak tempuh menuju lokasi Negeri Batu Merah yaitu + 5,9 km dari Kecamatan Sirimau dengan kondisi jalan aspal yang dapat dilalui transportasi roda dua dan empat (Latuamury et al., 2021a).

DAS Wae Batu Merah dengan posisi demikian, memiliki peran sangat penting sehingga banyak para pihak (*Multistakeholder*) yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang kuat dalam pengelolaan DAS tersebut. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini sangat penting untuk memotret para pemangku kepentingan dimaksud. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka tujuan penelitian adalah mengidentifikasi peran dan tugas Pemangku Kepentingan (Stakeholder) serta menganalisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Negeri Batu Merah Kota Ambon.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di DAS Wae Batu Merah Negeri Batu Merah Kota Ambon. Waktunya dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2022. Peta lokasi penelitian disajikan **Gambar 1**.



Bappeda Provinsi, Bappeda Litbang Kota Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, KPH Kota Ambon, BPDAS-HL Waehapu Batu Merah Wilayah Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Forum DAS, dan perangkat Pemerintahan Negeri Batu Merah.

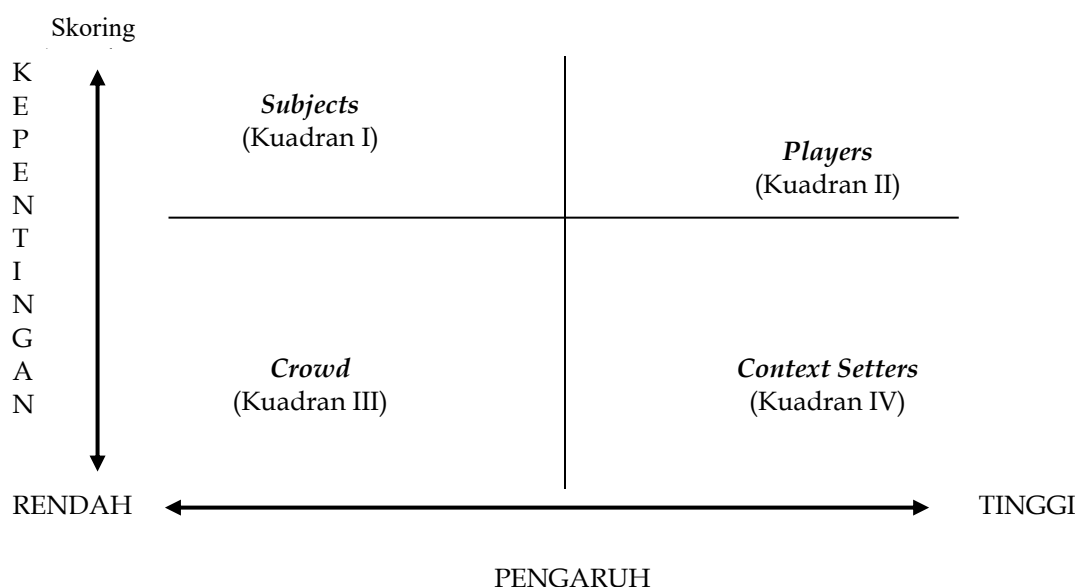
#### *Analisis Data*

Analisis stakeholder adalah suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem dan menilai masing-masing kepentingan dalam sistem tersebut. Stakeholder ialah semua pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan sistem tersebut (Bridoux & Stoelhorst, 2022). Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis stakeholder dengan menggunakan diagram aktor yang dibangun oleh (Ramoglou et al., 2023). Analisis *stakeholders* dilakukan untuk mengetahui minat/kepentingan dan peranan masing-masing *stakeholders* dan wewenang mereka dalam pengelolaan DAS. Analisis *stakeholder* menjadi alat seseorang untuk memperoleh informasi tentang “aktor yang relevan” untuk memahami perilaku, aktivitas dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan. Untuk melakukan analisis, analisator perlu melakukan tiga langkah, yaitu melakukan identifikasi *stakeholder* terlebih dahulu, kemudian pengelompokan atau pengkategorian, dan melakukan analisa hubungan antar *stakeholder* (Freeman et al., 2021).

Dalam menyusun matriks pengaruh dan kepentingan dari masing-masing *stakeholder* dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (dalam bentuk skor) dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kriteria pengaruh dan kepentingan (Hollebeek et al., 2023).

Berdasarkan matrik analisis stakeholder lalu dilakukan analisis kepentingan dan pengaruh terhadap *stakeholders* secara deskriptif. Kepentingan yang dimaksud adalah merujuk pada peran stakeholder dalam pencapaian output dan tujuan serta menjadi fokus pertimbangan terhadap keputusan. Sedangkan pengaruh ialah merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholders* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu kebijakan. Alat analisis yang digunakan adalah *stakeholder grid*. **Gambar 2** menunjukkan matriks hasil analisis stakeholder sebagai berikut:





**Gambar 2. Matriks Hasil Analisis Stakeholders**

*Subyek* adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan besar namun pengaruh kecil. Beberapa pihak dari *stakeholders* ini bahkan mempunyai kesungguhan dalam mengelola DAS Kota Ambon lebih baik walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan atau aturan.

*Players* adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan kewenangan besar. *Player* dapat diartikan sebagai pelaksana kunci yang berkepentingan dan memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan DAS Kota Ambon yang lebih baik.

*Contest setter* adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan kecil dan pengaruh yang besar. *Contest setter* dalam pengelolaan DAS Kota Ambon bisa diartikan sebagai *stakeholders* yang memiliki fungsi perencana makro dari pembangunan, koordinasi, yang karena lingkup kerjanya yang teramat luas maka dianggap minatnya kecil terhadap pengelolaan DAS Kota Ambon. Pengaruhnya besar karena *contest setter* mempunyai pengaruh untuk mengesahkan program-program dari instansi terkait, termasuk wewenang dalam prioritas pemberian anggaran. Atau yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan DAS, meskipun kepentingannya kecil.

*Crowd* adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang kecil. Pada kotak ini dimasukan *stakeholder* masyarakat. Masyarakat pada kotak *crowd* adalah mereka yang mempunyai minat kecil terhadap pengelolaan DAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Peran dan Tugas Pokok Stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah

Hasil analisis stakeholder menggunakan prosedur dari pendekatan *snow ball* yang diterapkan pada masing-masing instansi teknis yang diwawancarai dalam penelitian ini dengan proporsi mengikuti peranan dari organisasi perangkat tersebut. Penelusuran diawali dengan instansi teknis di bidang kehutanan, yakni Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS Waehapu Batu Merah, Balai Wilayah sungai yang melibatkan seluruh OPD Teknis yang berhubungan dengan program kerja di DAS Wae Batu Merah, dan instansi teknis berakhir di Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Bappeda Litbang Kota Ambon dan Bappeda Provinsi Maluku, BPBD Kota Ambon, Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta dan pemerintah negeri Batu Merah dan Negeri Soya.

Pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah berdasarkan identifikasi peran dan tugas pokok masing-masing organisasi perangkat daerah/instansi, sektor swasta dan kelompok masyarakat menunjukkan pembagian peran dan tupoksi (*role sharing*). Organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga pemerintah memiliki fungsi perencanaan yang dikoordinir oleh BAPPEDA untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan, Balitbang Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam perencanaan program-program terkait dengan pengelolaan sumberdaya air dan permasalahan sampah dan pencemaran lingkungan di sekitar bantaran sungai DAS Wae Batu Merah. Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS Wae Batu Merah dari 17 Stakeholders yang terlibat hanya KPHL Unit XIV Kota Ambon dan BPDASHL yang tidak melaksanakan pengelolaan DAS secara langsung. Hal ini disebabkan karena sampai dengan tahun 2018 kelembagaan KPHL Ambon belum defenitif, akan tetapi Penyuluh Lapangan masih memantau KTH Imanuel.

PDAM dan PT. DSA melaksanakan penanaman pohon pada kawasan hutan yang menjadi *Catchment Area* bekerjasama dengan Dinas Kehutanan untuk penyediaan bibit tanaman hutan (tahun 2016). Untuk mengantisipasi berkurangnya debit air di musim kemarau akibat mengeringnya beberapa sumber mata air di lokasi Air Besar Batu Merah, dan untuk menjaga kontinuitas penyediaan air bersih yang berkualitas dan layak bagi konsumsi masyarakat, PT. DSA membangun sumur resapan dan biopori dan direncanakan sudah dapat digunakan tahun depan. Masyarakat hulu dan KTH terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, disamping mendukung pertanian yang ramah lingkungan (tidak menggunakan pupuk anorganik). BPDASHL merencanakan penanaman sejuta pohon yang dilaksanakan adalah Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kota Ambon (tahun 2016) dengan melibatkan KTH Imanuel dan KBR Stain (saat itu masih aktif) pada kawasan hutan di hulu DAS Batu Merah. Sehingga untuk pelaksanaan pengelolaan DAS Batu Merah memerlukan sinergi dan koordinasi antar instansi.



Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah melaksanakan monev untuk program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi/Organisasi Perangkat Daerah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa lembaga yang melaksanakan monitoring dan evaluasi adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, BPDASHL, Balai Wilayah Sungai dan Forum DAS, Pemerintah Negeri Soya.

### **Analisis Pengaruh dan Kepentingan Para Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah**

Analisis *stakeholders* dilakukan untuk mengetahui minat/kepentingan dan peranan masing-masing *stakeholders* dan wewenang mereka dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah Kota Ambon. Purnama & Sulastri (2014) mengemukakan bahwa setiap stakeholder berhubungan positif yang ditunjukkan dengan nilai kumulatif dari atribut stakeholder sehingga setiap stakeholder yang memiliki nilai lebih tinggi lebih dianggap dibanding dengan stakeholder yang memiliki nilai lebih kecil. Temuan ini ditekankan bahwa stakeholder dapat bervariasi dari satu isu ke isu lainnya. Dengan demikian setiap stakeholder memiliki legitimasi dan kekuasaan yang berbeda-beda dalam sebuah kasus.

Hasil pemetaan matrik analisis pengaruh dan kepentingan terhadap *stakeholders* secara deskriptif. *Pengaruh* ialah merujuk pada kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholders* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu kebijakan, dan kepentingan yang dimaksud adalah merujuk pada peran stakeholder dalam pencapaian output dan tujuan serta menjadi fokus pertimbangan terhadap keputusan. Alat analisis yang digunakan adalah *stakeholder grid* dengan bantuan Microsoft Excel. Hasil analisis diilustrasikan pada **Gambar 3**, dimana *stakeholders* dikategorikan menurut tingkat kepentingan dan pengaruhnya dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil analisis stakeholder ketigabelas (13) OPD teknis dan kelompok masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan minat masing-masing stakeholder relatif hampir sama sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

Hasil penilaian pengaruh dan kepentingan dari ketigabelas stakeholder meliputi indikator penilaian terkait pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah antara lain: (1) kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan DAS, serta penyusunan program dan rencana pengelolaan DAS; (2) inventarisasi dan identifikasi sistem kelembagaan masyarakat, pengembangan model kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS; (3) pemantauan dan evaluasi tata air, penggunaan lahan, kelembagaan dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan DAS; (4) mengembangkan model pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS, (5) menyusun rencana penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS, sebagai lembaga eksekutif yang berperan dalam pengelolaan sumber daya air, (6) penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem hidrologi, (7) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, (8) berperan dalam

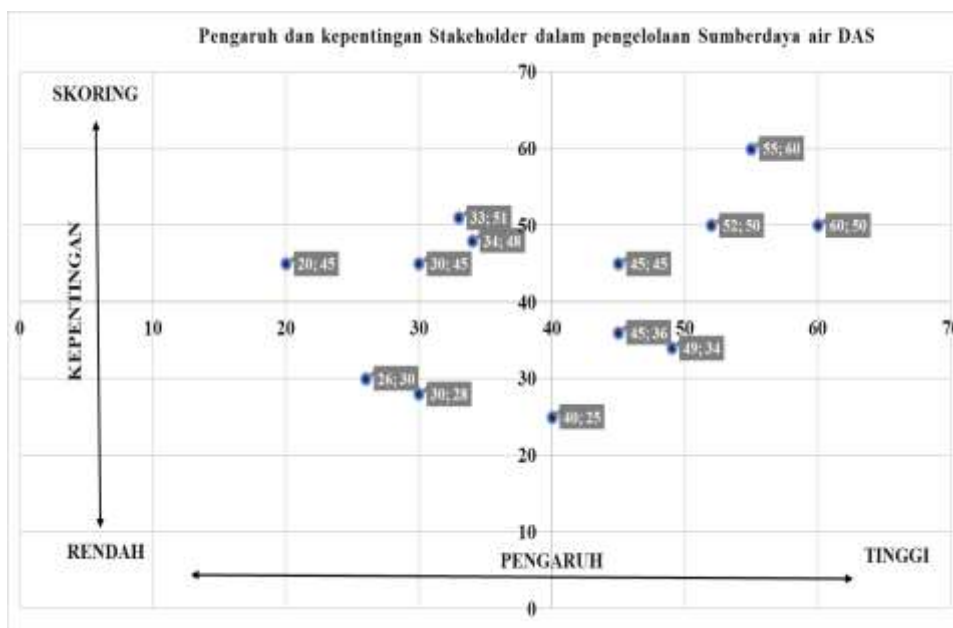
pengelolaan sumber daya air, pengukuran debit dan kualitas air, (9) berperan dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan, (10) berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/ supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS di wilayah kabupaten/kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu, berperan dalam pengelolaan lingkungan dan kualitas air; (11) berperan dalam menjaga lingkungan sekitar agar dapat berfungsi dengan baik, berperan dalam menjaga kualitas sungai tetap bersih, (12) berperan dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli tanah, berperan sebagai pengawas kegiatan pengelolaan SDA, (13) berperan sebagai pelaksana kegiatan berperan sebagai pengawas kegiatan pengelolaan SDA, berperan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan DAS.

Hasil skoring indikator-indikator pengaruh dan kepentingan dari masing-masing stakeholder menunjukkan bahwa ketigabelas stakeholder memiliki besaran skor yang dipetakan dalam empat kuadran pemetaan stakeholder sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Pemetaan Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah

Stakeholder	Interest	Kepentingan
<i>Kuadran I: Subyek</i>		
Pemerintah Negeri Soya	34	48
Pemerintah Negeri Batu Merah Kota Ambon	30	45
PT Dream Sukses Arindo (DSA) Ambon	33	51
PDAM Kota Ambon	20	45
<i>Kuadran II: Player</i>		
Balai Wilayah Sungai	60	50
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	55	60
Balai Pengelolaan DAS	52	50
Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon	45	45
<i>Kuadran III: Crown</i>		
Forum DAS Provinsi Maluku	30	28
UPTD KPH Kota Ambon	26	30
<i>Kuadran IV: Setter</i>		
Balitbang Kota Ambon	49	34
Bappeda Provinsi Maluku	45	36
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Maluku	40	25

Sumber : Data primer diolah, 2023



Gambar 3. Analisis pengaruh dan kepentingan para pihak dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah

**Subyek**

*Subyek* adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan besar namun pengaruh kecil. Beberapa pihak dari *stakeholders* ini bahkan mempunyai kesungguhan dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS Kota Ambon lebih baik walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan atau aturan. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (*stakeholder*) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat empat *stakeholder* yang berada pada kuadran I (*subjek*) yaitu Pemerintah Negeri Soya, Pemerintah Negeri Batu merah, PT Dream Sukses Arindo (DSA) dan PDAM Kota Ambon.

Pemerintah Negeri Batu Merah dan Negeri Soya, merupakan unit penyelenggara urusan pemerintahan tingkat bawah, Pemerintah Negeri Batu Merah dan Negeri Soya memiliki tugas pokok dan fungsi menjabarkan kebijakan perencanaan kota dalam bentuk perencanaan mikro desa, yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Pendampingan kepada masyarakat hulu merupakan tanggungjawab bersama antara *stakeholders* pengelolaan DAS yang ada karena proses pendampingan yang dilakukan secara intensif dapat menyadarkan dan membuat masyarakat hulu umumnya dan KTH menjadi sadar dan mandiri, serta dapat menjadi masyarakat yang konservatif. Untuk itu perlu adanya pendampingan bersama antara BPDAS dan instansi terkait, Forum DAS, akademisi, penyedia jasa air, kewang lingkungan hidung, LSM dan Sinode GPM kepada masyarakat hulu. Dalam melakukan pendampingan kiranya dilakukan dengan tujuan yang sama walaupun lintas sektor sehingga hulu DAS tetap berfungsi sebagai kawasan konservasi. Program konservasi terhadap hulu DAS yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai *stakeholders* pengelolaan DAS, maka diyakini akan membuat kawasan hulu DAS Kota Ambon menjadi baik.

Masyarakat yang tinggal di bagian hulu DAS memegang peranan yang penting pada keberhasilan pengelolaan DAS dan memiliki kepentingan terhadap kelestarian DAS. Penebangan pohon untuk membuka lahan pertanian tanpa didukung teknologi konservasi tanah dan air akan berdampak pada daerah dibawahnya. Masyarakat Hulu DAS memiliki ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap DAS. KTH Imanuel dan KBR STAIN merupakan KTH (kelompok bibit rakyat) STAIN merupakan kelompok yang di bentuk oleh Dinas Kehutanan dan Pertanian Kota (kini KPHL Unit XIV Kota Ambon) dalam rangka mengelola DAS dengan cara penyediaan bibit anakan dan kemudian dilakukan penanaman serta pemeliharaan anakan tersebut. Sebelum pengalihan kewenangan Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi Urusan Provinsi, kelompok ini dianggap sangat berhasil dengan program-program mereka yang dapat diimplikasikan dengan tingkat keberhasilan di lapangan..

### **Players**

*Players* adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan kewenangan besar. Player dapat diartikan sebagai pelaksana kunci yang berkepentingan dan memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan DAS Kota Ambon yang lebih baik. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat empat stakeholder yang berada pada kuadran II (*player*) yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Balai pengelolaan DAS Provinsi Maluku, dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Ambon. Keempat OPD Teknisk dalam kuadran II (*player*) ini memainkan peran dan tupoksinya sesuai dengan arahan dan kebijakan teknis dari OPD yang bersangkutan.

*Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku* memiliki pengaruh terkait perencanaan dan pembuatan bangunan-bangunan air seperti SPAS dalam rangka pemantauan tinggi muka air, pada sungai-sungai yang mengalir dalam DAS Kota Ambon. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaannya, Balai Sungai berkoordinasi dengan instansi teknis misalnya PU Kota Ambon dan BAPPEDA Kota.

*Dinas Kehutanan Provinsi Maluku* memiliki peranan dalam pengelolaan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai melalui program kerja rehabilitasi hutan dan lahan. Pengelolaan sumberdaya air dilibatkan dalam kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. DAS Wae Batu Merah termasuk dalam wilayah kerja BWS Maluku, terkait dengan pengelolaan DAS Wae Batu Merah. Balai Wilayah Sungai melalui bantuan pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB) melaksanakan Program FMSRB (*Flood Management in Selected River Basin*) yang berlokasi di DAS Wae Batu Merah dan DAS Wae Ruhu Desa Galala. FMSRB adalah pengendalian banjir secara struktural yang melibatkan beberapa lembaga yang terbentuk sebagai Tim Koordinasi antara lain BWS bertanggung jawab terhadap masalah Teknis dan Proses Pelaksanaan Pembebasan Tanah dibawah 5 Ha (Dasar Pengajuan; Perpres 40 Tahun 2014 dan Perda Kota Ambon) Bappeda Kota Ambon Bertanggung jawab terkait masalah sosial di Wae Ruhu dan Wae Batu Merah (*Social Action Plan*).

Balai Pengelolaan DAS Provinsi Maluku, dan instansi terkait dapat merencanakan program pengelolaan DAS yang sifatnya terpadu (bukan bersifat sektoral) sehingga mempunyai satu tujuan dan masyarakat hulu dapat menerima program tersebut dan mau terlibat secara bersama-sama dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Perlu menegakan aturan secara maksimal karena lewat penegakan aturan maka konservasi hulu DAS akan terjaga, selain itu melengkapi peraturan daerah yang sifatnya mengarah pada konservasi hulu DAS dengan selalu berkoordinasi dengan pihak legislatif supaya mendapat dukungan dari pihak legislatif lewat pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut maupun dukungan anggaran oleh pihak legislatif. Dukungan anggaran ini juga harus mempersiapkan sebagian anggaran untuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh instansi terkait maupun akademisi yang berhubungan dengan DAS di Kota Ambon karena hasil penelitian dapat dijadikan landasan untuk kegiatan apa yang layak dilakukan. daerah sumber air dari hutan menjadi penggunaan lain.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk mitigasi struktural mendapat dukungan dari BNPB bekerjasama dengan UGM untuk pengadaan Early Warning System Banjir di Hulu DAS Batu Merah. Selain itu memberikan penguatan kelembagaan masyarakat untuk mitigasi bencana dengan membentuk komunitas peduli sungai (pelatihan relawan penanggulangan bencana), pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana, serta membuat peta tematik sebaran banjir. Bersama dengan Balai Wilayah Sungai dalam Program FMSRB (*Flood Management In Selected River Basin*) yaitu Pengendalian Banjir Struktural di DAS Terpilih, Wae Batu Merah dan Wae Ruhu.

### **Crowd**

*Crowd* adalah mereka yang mempunyai minat kecil dan wewenang yang kecil. Pada kotak ini dimasukan *stakeholder* masyarakat. Masyarakat pada kotak *crowd* adalah mereka yang mempunyai minat kecil terhadap pengelolaan DAS. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (*stakeholder*) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat dua *stakeholder* yang berada pada **kuadran III (crown)** yaitu Forum DAS Provinsi Maluku, dan Unit Pelaksana Tekni daerah (UPTD) KPH Kota Ambon.

Unit Pelaksana Tekni daerah (UPTD) KPH Kota Ambon berperan penting dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan sampai tingkat tapak. Memiliki tenaga penyuluh di lapangan dengan kelompok – kelompok tani binaan. Terkait dengan pemeliharaan kawasan hutan di DAS Wae Batu Merah dilakukan pada tahun 2016 ketika masih pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan melibatkan kelompok Bibit Rakyat di STAIN. Kegiatan ini berhasil dengan baik melalui pemeliharaan di tahun I dan II. Sejak pengalihan Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Forum DAS dibentuk dengan satu tujuan yaitu pengelolaan DAS yang lebih baik. Artinya forum ini memiliki kepentingan untuk pengelolaan DAS termasuk di dalamnya ialah DAS Batu Merah. Forum DAS adalah lembaga non Pemerintah, multi stakeholder tidak memiliki struktur. Dalam penyusunan perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu bekerjasama dengan OPD terkait di Kota Ambon karena Wilayah DAS berada di Kota Ambon. Namun forum ini tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan hukum terkait pengelolaan DAS Wae Batu Merah yang lebih baik. Memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat. Forum DAS perlu melakukan pertemuan secara intensif antara sesama anggota sehingga peran sebagai koordinator dapat berjalan dengan baik. Selain itu Forum DAS dapat merencanakan dan berkoordinasi dengan KTH dan BPDAS tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan serta besar anggaran yang tersedia.

### **Contest Setter**

*Contest setter* adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan kecil dan pengaruh yang besar. *Contest setter* dalam pengelolaan DAS Kota Ambon bisa diartikan sebagai *stakeholders* yang memiliki fungsi perencana makro dari pembangunan, koordinasi, yang karena lingkup kerjanya yang teramat luas maka dianggap minatnya kecil terhadap pengelolaan DAS Kota Ambon. Pengaruhnya besar karena *contest setter* mempunyai pengaruh untuk mengesahkan program-program dari instansi terkait, termasuk wewenang dalam prioritas pemberian anggaran. Atau yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan DAS, meskipun kepentingannya kecil. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat tiga stakeholder yang berada pada *kuadran IV (Contest Setter)* yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Ambon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku, dan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku.

*Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Ambon* merupakan instansi dengan tupoksi merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikannya di tingkat Kota Ambon. Instansi ini memiliki pengaruh dalam perencanaan pembangunan termasuk yang berada di kawasan DAS Kota Ambon.

*Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Maluku* merupakan lembaga perencana makro pembangunan daerah. Instansi ini menjaring program-program dari instansi teknis lainnya maupun aspirasi dari masyarakat untuk dikoordinasikan dan disahkan. Wewenangnya juga besar dalam hal pendanaan karena instansi ini berwenang menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan program-program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Lebih khusus untuk pengelolaan DAS Wae Batu Merah bersama dengan Balai Wilayah Sungai, Bappeda Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon dan Dinas Pekerjaan Umum Kota terlibat dalam Program FMSRB (*Flood Management Selected River Basin*).

*Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*, memiliki kepentingan bahwa DAS sebagai aset ekologis dan sosial daerah. Lembaga ini berperan dalam perumusan perumusan, perencanaan,



pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pemantauan teknis bidang pencemaran dan dampak lingkungan dan kerusakan lingkungan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Instansi ini memiliki kewenangan mengadakan pemantauan kualitas lingkungan termasuk kualitas air sungai yang ada di Kabupaten/Kota. merumuskan kebijakan mengenai riset-riset yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah, termasuk menyusun masterplan tentang DAS Kota Ambon dan Buku Basis Data Lingkungan Hidup.

## KESIMPULAN

Hasil identifikasi peran dan tugas pokok para pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan dalam pengelolaan sumberdaya air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon meliputi 13 organisasi perangkat daerah (OPD)/instansi/ lembaga pemerintah. Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan para pihak (stakeholder) terkait pengelolaan sumberdaya air di DAS Wae Batu Merah menunjukkan bahwa terdapat empat stakeholder yang berada pada *Kuadran I (Subjek)* yaitu Pemerintah Negeri Soya, Pemerintah Negeri Batu merah, PT Dream Sukses Arindo (DSA) dan PDAM Kota Ambon. *Kuadran II (player)* yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Balai pengelolaan DAS Provinsi Maluku, dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Ambon. *Kuadran III (crown)* yaitu Forum DAS Provinsi Maluku, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Kota Ambon. Terakhir *Kuadran IV (Contest Setter)* yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Ambon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku, dan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku

## DAFTAR PUSTAKA

- Ast, J. A. V. A. N., & Rosa, M. P. (n.d.). *Developments in Participation Within*. 343–354.
- Barney, J. B., & Harrison, J. S. (2020). Stakeholder Theory at the Crossroads. In *Business and Society* (Vol. 59, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/0007650318796792>
- Bridoux, F., & Stoelhorst, J. W. (2022). Stakeholder theory, strategy, and organization: Past, present, and future. *Strategic Organization*, 20(4). <https://doi.org/10.1177/14761270221127628>
- Di Baldassarre, G., Sivapalan, M., Rusca, M., Cudennec, C., Garcia, M., Kreibich, H., Konar, M., Mondino, E., Mård, J., Pande, S., Sanderson, M. R., Tian, F., Viglione, A., Wei, J., Wei, Y., Yu, D. J., Srinivasan, V., & Blöschl, G. (2019). Sociohydrology: Scientific Challenges in Addressing the Sustainable Development Goals. *Water Resources Research*, 55(8). <https://doi.org/10.1029/2018WR023901>
- Ekawati, S., Kartodihardjo, H., Ridho Nurrochmat, D., Hardjanto, & Dwiprabowo, H. (2012). *Analisis Diskursus Dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kebijakan*. <http://puspijak.org/publikasi/Buku ilmiah 2010/Analisis Diskursus dan implikasinya.pdf>
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder Theory and the Resource-

- Based View of the Firm. *Journal of Management*, 47(7).  
<https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Hollebeek, L. D., Kumar, V., Srivastava, R. K., & Clark, M. K. (2023). Moving the stakeholder journey forward. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00878-3>
- Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder Engagement: Past, Present, and Future. *Business and Society*, 61(5). <https://doi.org/10.1177/00076503211066595>
- Latuamury, B., Marasabessy, H., Talaohu, M., & Imlabla, W. (2021a). Small island watershed morphometric and hydrological characteristics in Ambon Region, Maluku Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 800(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/800/1/012047>
- Latuamury, B., Marasabessy, H., Talaohu, M., & Imlabla, W. (2021b). Small island watershed morphometric and hydrological characteristics in Ambon Region, Maluku Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 800(1), 0–15. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/800/1/012047>
- Latuamury, B., Talaohu, M., Sahusilawane, F., & Imlabla, W. N. (2021). Correlation of normalized difference water index and baseflow index in small island watershed landscapes. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 883(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/883/1/012072>
- Latuamury, Bokiraiya. (2020). *Manajemen DAS Pulau-Pulau Kecil*. Deepublish.
- Luthfi, A. (2019). MODEL KELEMBAGAAN TATA KELOLA SUMBERDAYA AIR TANAH YANG BERKELANJUTAN (Studi di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember). *Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal*, 1(1), 47–56. <https://doi.org/10.36441/seoi.v1i1.608>
- Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D. R., & Justianto, A. (2015). MANUSIA KEHUTANAN ( Stakeholder Analysis on Forestry Human Resources Management and Development ) untuk dikelola dan dikembangkan melalui kebijakan-kebijakan yang secara aktif. <http://Ejournal.Forda-Mof.Org/Ejournal-Litbang/Index.Php/JAKK/Article/View/1300>, 12(No. 3), 1–26.
- Ozdemir, S., Carlos Fernandez de Arroyabe, J., Sena, V., & Gupta, S. (2023). Stakeholder diversity and collaborative innovation: Integrating the resource-based view with stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113955>
- Purnama, R., & Sulastri. (2014). Analisis Model Kekuatan Stakeholder Dalam Desain Dan Implementas! Kebijakan Upi. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 5(2), 85–96. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/13419>
- Ramoglou, S., Zyglidopoulos, S., & Papadopoulou, F. (2023). Is There Opportunity Without Stakeholders? A Stakeholder Theory Critique and Development of Opportunity-Actualization. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 47(1). <https://doi.org/10.1177/10422587211043354>
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>